

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM TAHUN 2017



SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Dasar pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinejra Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berisi informasi pengukuran kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 dan dalam konteks untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bertanggungjawab.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh jajaran Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Samarinda, Februari 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Hj. MEILIANA SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590509 198602 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel merupakan fenomena yang berkembang belakangan ini. Keinginan untuk perubahan tersebut di atas bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta semakin mandirinya media masa yang didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dalam penyelenggaraan SAKIP meliputi Perencanaan Strategik (Renstra), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja serta reuiu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja Setda Prov.Kaltim tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk tahun 2017 dengan 12 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 15 indikator. Adapun capaian kinerja dari seluruh sasaran dan indikator kinerja adalah 83.34% dengan interpretasi "Sangat Baik", Sedangkan Capaian Realisasi Anggaran dari pelaksanaan program tersebut sebesar Rp.140.683.588.839,- atau sebesar 86,56% dari total anggaran sebesar Rp. 162.536.420.769,38,-

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
I PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	2
1.3 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	3
1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	5
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Manusia	7
II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1 Visi	13
2.1.2 Misi	16
2.1.3 Tujuan	16
2.1.4. Sasaran	20
2.1.5. Indikator Kinerja	22
2.1.6. Strategi	23
2.1.7. Kebijakan	26
2.1.8. Program	29
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	31
2.3 Perjanjian Kinerja	32
III. AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	35
3.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017	39
3.3 Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja	41
3.4 Realisasi Anggaran	70
IV PENUTUP	72
Lampiran-Lampiran	
Perjanjian Kinerja	
Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Kaltim Menurut Pendidikan Tahun 2017	8
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Menurut Golongan Tahun 2018	9
Tabel 1.3	Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Kaltim Menurut Formasi Jabatan Tahun 2018	10
Tabel 1.4	Sumber Daya Aparatur Setda Provinsi Kaltim Berdasarkan Kriteria Gender Tahun 2018	11
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan Penyelenggaraan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	18
Tabel 2.2	Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis	22
Tabel 2.3	Penentuan Indikator Kinerja Sasaran	23
Tabel 2.4	Progam untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017	25
Tabel 2.5	Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	27
Tabel 2.6	Progam untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017	30
Tabel 2.7	Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017	31
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	33
Tabel 3.1	Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tahun 2017	40
Tabel 3.2	Acuan Nilai Persepsi Interval SKM dan Nilai Kinerja Unit Pelayanan	61
Tabel 3.3	Instansi /Lembaga Yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	62
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2017	65
Tabel 3.5	Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2017	69

Tabel 3.6	Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2017	70
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran Sasaran dan program Tahun 2017	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Keterkaitan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Instansi di bawahnya	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP;
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
- d. Jenis dan banyaknya tugas;
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- f. Jumlah kepadatan penduduk, dan;
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ **HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI** “ yang berarti bahwa walaupun struktur

organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dan diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016.

1.2 Aspek Strategis Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Sekretariat Daerah sebagai unsur Staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran,

sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian Strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Sekretariat Daerah akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Sekretariat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan. Sekretariat Daerah akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan publik.

1.3 Permasalahan utama (Isu Strategis).

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor-faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, telaah terhadap visi dan misi Gubernur serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup

Strategis, maka Isu-Isu strategis di lingkungan Sekretariat Daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi :

1. Sering tidak terpenuhinya persyaratan dan rekomendasi permohonan ijin keluar negeri Pejabat Negara dan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;
2. Belum tersedianya data base kependudukan yang akurat sebagai pedoman dan acuan guna penyusunan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah;
3. Belum semua penduduk memiliki dokumen kependudukan secara lengkap meliputi kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan akta perkawinan dan kepemilikan akta kematian serta dokumen kependudukan lainnya;
4. Dalam rangka Otonomi Daerah, pemerintah pusat tidak sepenuhnya melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah;
5. Belum fokusnya bagian Bankum dalam menangani sengketa karena tidak adanya bidang tugas yang khusus menangani hal tersebut;
6. Sistem jaringan informasi Hukum belum maksimal difungsikan;
7. Tuntutan masyarakat makin tinggi untuk mencari keadilan dan penyelesaian Hukum ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Perlunya penanganan penyelesaian batas administrasi wilayah;
9. Perlunya pelaksanaan sistem koordinasi dalam penanganan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan antar provinsi;
10. Perlunya administrasi perencanaan penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
11. Perlunya Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri;
12. Optimalisasi penyaluran beras untuk masyarakat miskin;
13. Masih tingginya nilai inflasi daerah;
14. Makin banyaknya organisasi kemasyarakatan penerima hibah dan bantuan sosial;

15. Perlunya koordinasi di bidang Kesejahteraan rakyat;
16. Perlunya pelayanan yang maksimal di bidang kehumasan dan keprotokolan;
17. Perlu revisi PP 41 Tahun 2007;
18. Ditetapkannya target SPM dalam RPJMD;
19. Tuntutan pelayanan yang cepat, murah, mudah dan transparan;
20. Pentingnya penerapan Anjab dan ABK dalam penyusunan standar kompetensi;
21. Perlunya peningkatan disiplin Aparatur;
22. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah yang akuntabel;
23. Diperlukan sistem aplikasi administrasi dan pelaporan keuangan sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
24. Pelaksanaan sistem Manajemen Tata Kelola Barang Milik Daerah;
25. Tertib Penataan Administrasi Umum di Sekretariat Daerah;
26. Terbatasnya sarana dan prasarana Pendukung di lingkungan Sekretariat Daerah.

1.4 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Provinsi yang berada di bawah Gubernur. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tatalaksana dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :

■ Sekretaris Daerah

1. Staf Ahli

- a. Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Hukum dan Keamanan
- b. Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah.
- c. Bidang SDA, Perekonomian Daerah dan Kesra

No.	Perangkat Daerah	
A.	Sekretariat Daerah, yang membawahi :	
	1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan
	a	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
	b	Biro Hukum
	c	Biro Kesejahteraan Rakyat
	2.	Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, mengkoordinasikan
	a	Biro Perekonomian
	b	Biro Administrasi Pembangunan
	b	Biro Infrastruktur

	3.	Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan	
	a	Biro Organisasi	
	b	Biro Hubungan Masyarakat.	
	c	Biro Umum.	

1.6 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering :

1. Pendidikan

Sampai dengan Per 1 Maret 2018 Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 379 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim dari 379 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S1 menduduki urutan Kedua dengan jumlah 132 orang urutan pertama adalah pendidikan SLTA yaitu sebanyak 127 orang dan urutan ketiga adalah pendidikan S2 sebanyak 73 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim keadaan bulan Maret tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1

SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2018

No.	EKSEKUTIF/BIRO	S.3	S.2	S.1	SM	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	0							0
2	Asisten	1	2						3
3	Staf ahli		2	1					3
4	Tenaga Ahli	3							3
5	Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah	0	8	14	1	12	0	0	35
6	Biro Hukum	0	9	17	1	1	0	0	28
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	0	9	14	0	7	0	0	30
8	Biro Perekonomian	0	7	15	1	7	0	0	30
9	Biro Administrasi Pembangunan	0	6	11	3	4	0	0	24
10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	0	7	12	1	4	0	0	24
11	Biro Hubungan Masyarakat	0	9	16	1	17	0	0	43
12	Biro Umum	0	5	23	6	68	15	13	130
13	Biro Organisasi	0	9	9	1	7	0	0	26
Jumlah		4	73	132	15	127	15	13	379

Keadaan Per 1 Maret 2018
Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (Kepegawaian)

2. Golongan, Eselon dan Jenis Kelamin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan.

Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan Per 1 Maret 2018 PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim yang memiliki golongan III sebanyak 379 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 101 orang, golongan IV sebanyak 71 orang dan golongan I sebanyak 22 orang.

Tabel 1.2

SUMBER DAYA APARATUR
SETDA PROVINSI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2018

No.	EKSEKUTIF/BIRO	GOL. IV	GOL.III	GOL. II	GOL. I	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	0				0
2	Asisten	3				3
3	Staf ahli	3				3
4	Tenaga Ahli	3				3
5	Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah	6	22	6	1	35
6	Biro Hukum	9	17	2	0	28
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	9	19	2	0	30
8	Biro Perekonomian	7	21	2	0	30
9	Biro Administrasi Pembangunan	5	16	3	0	24
10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	4	19	1	0	24
11	Biro Hubungan Masyarakat	9	20	14	0	43
12	Biro Umum	6	39	64	21	130
13	Biro Organisasi	7	12	7	0	26
	Jumlah	71	185	101	22	379

Keadaan Per 1 Maret 2018

Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (Kepegawaian)

Berdasarkan Per 1 Maret 2018 Jumlah Eselon Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 130 orang dengan berbagai tingkat Eselon mulai dari Eselon I sampai dengan IV Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Setda Provinsi Kaltim berdasarkan Eselon :

Tabel 1.3

SUMBER DAYA APARATUR
SETDA PROVINSI KALTIM MENURUT FORMASI JABATAN TAHUN 2018

No.	EKSEKUTIF/BIRO	Eselon I.B	Eselon II.A	Eselon II.B	Eselon III.A	Eselon IV.A	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	1					1
2	Asisten		3				3
3	Staf ahli		3				3
4	Tenaga Ahli		6				6
5	Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah			1	3	9	13
6	Biro Hukum			1	3	9	13
7	Biro Kesejahteraan Rakyat			1	3	9	13
8	Biro Perekonomian			1	3	9	13
9	Biro Administrasi Pembangunan			1	3	9	13
10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya			1	3	9	13
11	Biro Hubungan Masyarakat			1	3	9	13
12	Biro Umum			1	3	9	13
13	Biro Organisasi			1	3	9	13
	Jumlah	1	12	9	27	81	130

Keadaan Per 1 Maret 2018
Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim
(Kepegawaian)

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1.4

SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM
BERDASARKAN KRITERIA GENDER TAHUN 2018

No.	EKSEKUTIF/BIRO	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris Daerah	0		0
2	Asisten	2	1	3
3	Staf ahli	3		3
4	Tenaga Ahli	2	1	3
5	Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah	20	15	35
6	Biro Hukum	16	12	28
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	17	13	30
8	Biro Perekonomian	19	11	30
9	Biro Administrasi Pembangunan	14	10	24
10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya	17	7	24
11	Biro Hubungan Masyarakat	29	14	43
12	Biro Umum	101	29	130
13	Biro Organisasi	18	8	26
	Jumlah	258	121	379

Keadaan Per 1 Maret 2018

Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim (Kepegawaian)

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis.

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang ditandai dengan adanya keseimbangan peran pemerintah, swasta dan masyarakat, perlu dilakukan pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing komponen tersebut. Upaya ini perlu dibangun dengan komitmen yang kuat terutama dari kalangan pemerintah menuju reformasi administrasi publik untuk menciptakan organisasi yang lebih mengedepankan fungsi pengendalian/pembuat kebijakan (*steering*) dari pada fungsi pelaksanaan (*rowing*).

Perlu juga disadari bahwa upaya reformasi kelembagaan, merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara keseluruhan. Artinya, keberhasilan dalam menata kelembagaan perangkat daerah sangat tergantung pada keberhasilan aspek lain seperti penataan sistem kepegawaian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

2.1.1 Visi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Memasuki era otonomi daerah semangat reformasi masih terasa dan menyentuh seluruh sendi kehidupan yang bermuara kepada semangat untuk meninggalkan sistem lama yang tidak transparan menuju Pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, transparan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memotivasi tumbuh dan berkembangnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat didalam penyelenggaraan berbagai aktivitasnya. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat berperan optimal dan terarah dalam mendorong Pemerintahan yang lebih mampu mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan daerah.

Meningkatnya persaingan di era perdagangan bebas, tuntutan pemberdayaan masyarakat dan daerah melalui pelayanan prima merupakan kondisi yang sangat di sadari oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar lebih unggul, dan lebih maju, serta senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Sekretaris Daerah selaku unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah disamping fungsinya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Mengingat besarnya beban tugas dan tanggung jawab seorang Sekretaris Daerah dalam melaksanakan proses administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih terhadap pemberian

pelayanan kepada seluruh perangkat daerah, maka sudah barang tentu perlu didukung oleh staf yang profesional.

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi kekuatan eksternal yang terjadi diluar Sekretariat Daerah Provinsi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perubahan dan tuntutan kinerja internal adalah :

1. Sering terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2. Pedoman pelaksanaan otonomi daerah belum memadai
3. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi pemerintahan daerah
4. Sering terjadinya situasi yang kurang kondusif

Tuntutan perubahan tersebut akan terjadi terus menerus, yang mengandung konsekuensi adanya upaya untuk terus melakukan tindakan-tindakan ke arah perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karenanya perubahan tersebut harus diantisipasi dalam tindakan yang terkonsep, dan disusun dalam tahapan yang terencana, dihayati dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua sumber daya aparatur tanpa kecuali, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaatnya.

Untuk mendukung pencapaian maksud tersebut diatas perlu diciptakan Visi yang jelas untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat, komitmen, daya dorong, arah tugas dan fungsi, serta menyatukan cara pandang jauh ke depan seluruh Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kalimantan Timur ke arah tujuan yang akan dicapai.

Bertolak dari kondisi diatas, maka tugas di jajaran Sekretariat Daerah Kalimantan Timur kedepan semakin berat dan kompleks, sehingga memerlukan adanya upaya-upaya bertahap, terencana, dan konsisten dalam mengoptimalkan pemanfaatan segala Sumber Daya, mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal dalam kemajuan jaman maka Sekretariat Daerah menetapkan visi sebagai berikut :

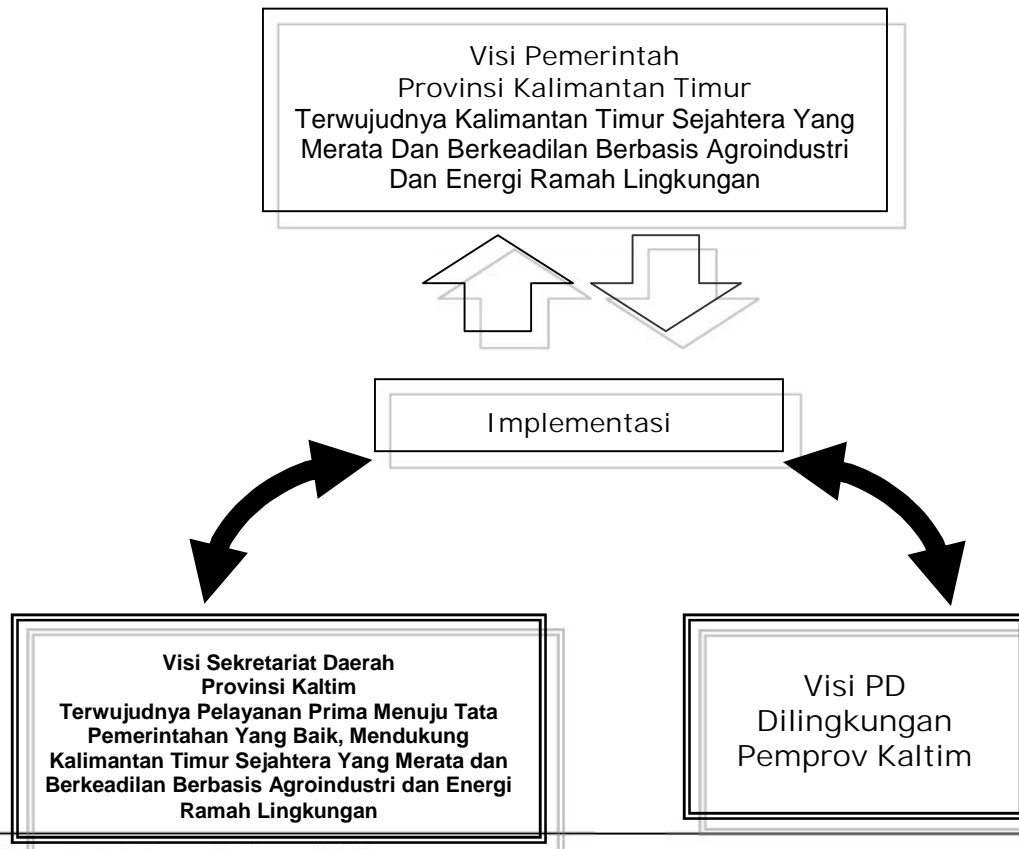
Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Mendukung Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan

Upaya untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat dari pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum yang prima oleh Sekretariat Daerah yang tentunya sangat berharga dalam percepatan pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Visi Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1

Keterkaitan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Instansi di bawahnya



2.1.2 Misi

Kemampuan organisasi untuk membuat uraian kegiatan secara akurat menggambarkan lingkup pekerjaan yang dimasuki, memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menyediakan produk pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan semua *stakeholders*, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi terjamin.

Adapun Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur :

1. Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah **di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama** secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan ;
2. Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah **di bidang pembangunan daerah dan perekonomian** yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan ;
3. Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah **di bidang sosial, hubungan masyarakat dan protokol** yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik ;
4. Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah **di bidang organisasi, keuangan, perlengkapan dan umum** secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel

2.1.3 Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi Setda Provinsi Kalimantan Timur, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Misi Pertama " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan ", dengan tujuan :
 - (1) Mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik ;
 - (2) Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
 - (3) Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama.
2. Misi Kedua " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dan perekonomian yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan ", dengan tujuan :
 - (1) Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel ;
 - (2) Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
3. Misi Ketiga " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosial, hubungan masyarakat dan protokol yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik ", dengan tujuan :
 - (1) Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat ;

- (2) Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
4. Misi Keempat " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, keuangan, perlengkapan dan umum secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel ", dengan tujuan :
- (1) Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik ;
 - (2) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel ;
 - (3) Mewujudkan tata kelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ;
 - (4) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur.

Upaya perwujudan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tahun 2013-2018 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan masing – masing misi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi dan Tujuan Penyelenggaraan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Misi		Tujuan	
1	Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum,	1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik
		2	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan,

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

	perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan		pembangunan dan pelayanan masyarakat
		3	Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama.
2	Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dan perekonomian yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan	4	Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel
		5	Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
3	Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosial, hubungan masyarakat dan protokol yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik	6	Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
		7	Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
4	Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	8	Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik
		9	Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur.

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan tujuan antara dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan Strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Berdasarkan fokus Sasaran dalam periode tahun 2013-2018 yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada sebagai berikut :

- (1) Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik, sasarannya adalah :
 - a. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - b. Terselenggaranya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan NIK Nasional ;
- (2) Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM;
 - b. Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM;
- (3) Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama, sasarannya adalah:
 - a. Meningkatnya kerjasama antar daerah ;
 - b. Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kabupaten/kota dan provinsi ;

- (4) Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai rencana;
- (5) Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya koordinasi dan kebijakan bidang perekonomian ;
- (6) Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat ;
- (7) Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas ;
- (8) Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel ;
- (9) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur, sasarannya adalah :
 - a. Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum

Tabel 2.2

Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya Kualitas LPPD
		2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional
2	Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan	3	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi
3	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	4	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM
		5	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparat/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM
4	Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.	6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana
5	Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	7	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian
6	Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	8	Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat
7	Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim	9	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas
8	optimalisasi kerjasama	10	Meningkatnya kerjasama antar daerah
9	Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik	11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparat/ yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel
10	Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi Umum	12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum

2.1.5 Indikator Kinerja.

Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Adapun indikator kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Penentuan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas LPPD	1	Predikat LPPD
2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	2	Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"
3	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	3	Jumlah Penegasan Titik Batas melalui pemasangan pilar
4	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	4	Jumlah produk hukum yang ditetapkan
5	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	5	Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6	Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana
7	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	7	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi
		8	Persentase target ketercapaian program/kegiatan bidang Perekonomian
8	Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat	9	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra
		10	Persentase target ketercapaian Program/ Kegiatan bidang Kesra
9	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11	Prosentase berita positif pembangunan daerah
10	Meningkatnya kerjasama antar daerah	12	Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	13	Skor SKM rata2 unit pelayanan
		14	Nilai Akuntabilitas Provinsi
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum	15	Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi

2.1.6. Strategi

Untuk menentukan strategi yang diterapkan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2013-2018 dalam upaya mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan adanya faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Strategi kunci untuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;
2. Menerapkan e_government dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat ;
3. Memfokuskan secara jelas segmen-segmen batas yang strategis dan mendesak untuk dapat segera dituangkan dalam kebijakan penegasan batas ;
4. Meningkatkan pembinaan kepada PD dan kabupaten/kota dalam menyusun dan membuat produk hukum seperti Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
5. Meningkatkan pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan Sekretariat Daerah ;
6. Meningkatkan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan ;
7. Implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri ;
8. Melakukan sinergitas bidang perekonomian daerah ;
9. Melakukan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat secara intensif ;
10. Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) melalui jejaring kehumasan ;
11. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan mitra kerjasama yang tepat dan potensial ;
12. Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya Kelembagaan dan Analisis Jabatan
13. Peningkatan Standar Pelayanan ;
14. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja;

15. Tersedianya kebijakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi

16. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ;

17. Meningkatkan penataan administrasi umum.

Tabel 2.4

Penentuan Strategi

	Sasaran Strategis	Strategi
1	Meningkatnya Kualitas LPPD	Mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;
2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	Menerapkan e_government dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat ;
3	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	Memfokuskan secara jelas segmen-segmen batas yang strategis dan mendesak untuk dapat segera dituangkan dalam kebijakan penegasan batas ;
4	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dan kabupaten/kota dalam menyusun dan membuat produk hukum seperti Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
5	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparaturnya masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	Meningkatkan pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan Sekretariat Daerah ; Meningkatkan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan ; Implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri ;
7	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	Melakukan sinergitas bidang perekonomian daerah ;
8	Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat	Melakukan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat secara intensif ;
9	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) melalui jejaring kehumasan ;
10	Meningkatnya kerjasama antar daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan mitra kerjasama yang tepat dan potensial ;
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparaturnya yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya Kelembagaan dan Analisis Jabatan Peningkatan Standar Pelayanan.

		Penyempurnaan sistem manajemen kinerja.
		Tersedianya kebijakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	Meningkatkan penataan administrasi umum.

2.1.7 Kebijakan

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan misi dan visi Pemerintah Daerah.

Adapun kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dimaksud di atas meliputi :

1. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan urusan pemerintahan ;
 2. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mengacu pada pelaksanaan SIAK dan NIK Nasional.
 3. Membangun kesamaan pemahaman akan pentingnya azas kepastian hukum ;
 4. Meningkatkan akurasi dan koordinasi data survey sebagai bahan pengembangan data dan informasi batas wilayah, penataan daerah dan kerjasama yang komprehensif.
 5. Penyelenggaraan sistem pembinaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terencana, terkoordinir dan komprehensif ;
1. Peningkatan peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel.
 2. Melakukan sinergitas dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
 3. Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat secara intensif.

4. Peningkatan kerjasama kehumasan dan keprotokolan dalam akses penyediaan informasi publik
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan ;
6. Peningkatan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) ;
7. Penerapan Ketatalaksanaan yang transparan.
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Sistem Manajemen Kinerja).
9. Peningkatan standar pelayanan administrasi umum.

Tabel 2.5

Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan		Sasaran		Strategi	Kebijakan
1	Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya Kualitas LPPD	Mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;	Koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan urusan pemerintahan ;
		2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	Menerapkan e_government dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat ;	Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mengacu pada pelaksanaan SIAK dan NIK Nasional
2	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	3	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dan kabupaten/kota dalam menyusun dan membuat produk hukum seperti Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;	Membangun kesamaan pemahaman akan pentingnya azas kepastian hukum ;
		4	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM		
3	Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama	5	Meningkatnya kerjasama antar daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan mitra kerjasama yang tepat dan potensial ;	Meningkatkan akurasi dan koordinasi data survey sebagai bahan pengembangan data dan informasi batas wilayah, penataan daerah dan kerjasama yang komprehensif.
		6	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	Memfokuskan secara jelas segmen-segmen batas yang strategis dan mendesak untuk	

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

				dapat segera dituangkan dalam kebijakan penegasan batas ;	
4	Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.	7	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	Meningkatkan pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan Sekretariat Daerah; Meningkatkan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan ; Implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri ;	Penyelenggaraan sistem pembinaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terencana, terkoordinir dan komprehensif ; Peningkatan peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel.
5	Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	8	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	Melakukan sinergitas bidang perekonomian daerah ;	Melakukan sinergitas dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
6	Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	9	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	Melakukan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat secara intensif ;	Menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat secara intensif.
7	Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim	10	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) melalui jejaring kehumasan ;	Peningkatan kerjasama kehumasan dan keprotokolan dalam akses penyediaan informasi publik
8	Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik	11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya Kelembagaan dan Analisis Jabatan Peningkatan Standar Pelayanan. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja. Tersedianya kebijakan Reformasi Birokrasi secara terintegrasi	Peningkatan kapasitas kelembagaan Peningkatan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Penerapan Ketatalaksanaan yang transparan. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Sistem Manajemen Kinerja).
9	Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi Umum	12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	Meningkatkan penataan administrasi umum.	Peningkatan standar pelayanan administrasi umum.

2.1.8 Program

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan yaitu :

1. Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
5. Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi
6. Program Bantuan Hukum dan HAM
7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
9. Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan
10. Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan
11. Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
13. Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
14. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
15. Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan
16. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
17. Program Peningkatan Pelayanan Publik
18. Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
19. Program Penataan Organisasi
20. Program Penataan Pendayagunaan Aparatur
21. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja
22. Program Peningkatan System Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
23. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

24. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
29. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
30. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Tabel 2.6

Program untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

Sasaran Strategis		Program	
1	Meningkatnya Kualitas LPPD		Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah
2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional		Program Penataan Administrasi Kependudukan
3	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi		Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM		Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
5	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM		Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
			Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi
			Program Bantuan Hukum dan HAM
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana		Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan
7	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian		Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Manajemen Pemerintahan
			Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
8	Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat		Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
			Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat
9	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
			Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan
			Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
10	Meningkatnya kerjasama antar daerah		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel		Program Peningkatan Pelayanan Publik
			Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
			Program Penataan Organisasi
			Program Penataan Pendayagunaan Aparatur
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum		Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Massa
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja (Renja) di Daerah.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2015 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas LPPD	1	Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi
2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	2	Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"	%	90
3	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	3	Jumlah Penegasan Titik Batas melalui pemasangan pilar	PBU	5
4	Terwujudnya produk	4	Jumlah produk hukum yang	Dokumen	610

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

	hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM		ditetapkan		
5	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparaturnya/masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	5	Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	95
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6	Prosentase program/kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	90
7	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	7	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi	Persentase	100
		8	Persentase target ketercapaian program/kegiatan bidang Perekonomian	Persentase	100
8	Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat	9	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra	Persentase	85
		10	Persentase target ketercapaian Program/Kegiatan bidang Kesra	Persentase	85
9	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11	Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90
10	Meningkatnya kerjasama antar daerah	12	Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)	MoU	50
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparaturnya yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	13	Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	Sangat Baik (83%)
		14	Nilai Akuntabilitas Provinsi	-	78
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum	15	Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	90

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2017.

Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Untuk tahun 2017 ditetapkan sebanyak 12 Sasaran dengan 15 indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi
2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	2 Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"	%	90
3	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	3 Jumlah Penegasan Titik Batas melalui pemasangan pilar	PBU	5
4	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	4 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610
5	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	5 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	95
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	90
7	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	7 Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi	Persentase	100
		8 Persentase target ketercapaian program/kegiatan bidang Perekonomian	Persentase	100
8	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	9 Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra	Persentase	85
		10 Persentase target ketercapaian Program/ Kegiatan bidang Kesra	Persentase	85
9	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara	11 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

	internal dan eksternal yang berkualitas				
10	Meningkatnya kerjasama antar daerah	12	Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)	MoU	50
11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	13	Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	Sangat Baik (83%)
		14	Nilai Akuntabilitas Provinsi	-	78
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	15	Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 memperoleh nilai 64,26 (Baik) atau dengan predikat Penilaian "B" (Baik) sebagaimana tabel berikut :

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2015	Nilai 2016
1	Perencanaan Kinerja	30	20,65	21,58
2	Pengukuran Kinerja	25	14,92	15,31
3	Pelaporan Kinerja	15	9,98	10,88
4	Evaluasi Internal	10	6,38	5,70
5	Pencapaian Kinerja	20	11,33	10,79

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

Nilai Evaluasi	100	63,26	64,26
Kategori Penilaian		B	B

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur agar melakukan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

Rekomendasi		Tindak Lanjut
a.	Perencanaan Kinerja	
	a) Perencanaan Strategis	
	Dalam Dokumen Renstra utamanya terhadap peningkatan kualitas Renstra agar ukuran Keberhasilan (indikator) Tujuan (outcome) maupun indikator kinerja saran untuk itu integritas dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran dipadukan pelaksanaannya serta tujuan yang ditetapkan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan	Dalam Reviu Renstra sudah ada indikator Tujuan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan reviu atas Renstra dan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan dalam penyusunan RKT sehingga selaras dengan RPJMD serta sudah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang dapat dilihat dalam pengukuran kinerja
	b) Perencanaan Kinerja Tahunan	
	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan supaya	
	- Kegiatan yang ditetapkan merupakan cara untuk mencapai sasaran	Ya, dalam mencapai tujuan/sasaran upaya dilakukan melalui program/kegiatan
	- Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran didukung oleh anggaran yang memadai	Ya, sudah
	- Dokumen Perjanjian Kinerja selaras dengan renstra	Ya, dapat dilihat BaB IV Renstra Setda Prov.Kaltim
	- Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) mengacu/selaras dengan kontrak kinerja	Ya, cukup jelas terdapat pada Rencana jangka menengah pada dokumen RENSTRA
	- Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	Ya, Bahwa Perjanjian kinerja telah menyajikan IKU yang ditetapkan dan selaras dengan Dokumen RPJMD serta telah membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang tingkat Eselon III dan IV (Biro-Biro) sebagai bahan penetapan target kinerja dan dapat dimanfaatkan untuk identifikasi capaian kinerja.
	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan supaya :	
	- Target kinerja yang diperjanjikan dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward)	Ya, sesuai target yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan
	- Monitoring rencana aksi dilakukan	Ya, dimana masing-masing Biro

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

		tidak hanya terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja	daerah melakukan evaluasi secara internal terhadap capaian kinerja.
		- Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	Ya, Rencana aksi dibuat untuk mengevaluasi sampai dimana target yang direncanakan dapat direalisasikan
		- Target Perjanjian kinerja memiliki keselarasan target kinerja eselon III dan IV	Ya, berdasarkan Renstra dan RKT masing-masing Biro daerah membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang
b	Pengukuran Kinerja		
	Dalam Pengukuran Kinerja untuk implementasi supaya :		
	.	Kualitas Pengukuran dapat diandalkan, maka :	
		- Ukuran (indikator) kinerja Eselon III dan IV memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;	Ya, Membuat cascading dari sasaran Rencana Strategis sesuai dengan penjabaran visi dan misi RENSTRA.
		- Indikator kinerja Eselon III dan IV selaras dengan indikator kinerja atasannya;	Ya, Setda Prov.Kaltim telah Menetapkan tujuan/sasaran maupun Indikator kinerja dalam IKU selaras dengan RENSTRA, RKT dan PK.
		- Ukuran (indikator) kinerja individu selaras dengan IKU atasannya;	Ya, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan reviu atas Renstra dan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan dalam penyusunan RKT sehingga selaras dengan RPJMD
		- Pengukuran kinerja dilakukan berjenjang;	Ya, masing-masing Biro melakukan pengukuran berdasarkan perjanjian kinerja
		- Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.	Ya, dilakukan secara monitoring dan evaluasi secara triwulanan
	.	Implementasi Pengukuran agar :	
		- IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.	Ya, harus terintegrasi dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran (RENSTRA, Renja/RKT dan RKA/DPA)
		- IKU dijadikan dasar pemberian reward atau punishment	Pemerintah Prov.Kaltim setiap tahun mengadakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Tim yang dipimpin Sektor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov.
		- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment terkait dengan pejabat/pegawai yang berkinerja	Ya, harusnya dalam menjalankan manajemen kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

		dengan yang tidak berkinerja tidak jelas hasil pengukurannya;	
		- IKU yang telah direviu terdapat upaya perbaikan yang signifikan;	Ya.
		- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan secara berkala	Ya, melalui sistem SIAKIP
c	Pelaporan Kinerja		
	Dalam pelaporan kinerja penyajian dan pemanfaatan informasi kinerja supaya :		
	.	Penyajian Informasi agar	
		- Laporan Kinerja telah menyajikan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;	Ya, di Bab III Laporan Kinerja
		- Laporan Kinerja dapat diandalkan.	Ya
	.	Pemanfaatan Informasi agar	
		- Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan;	Ya, menjadi <i>feed back</i> perencanaan tahun kedepan
		- Informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;	Ya, adanya keselarasan kinerja dan penganggaran
		- Informasi yang disajikan digunakan untuk peningkatan kinerja;	Ya, Selanjutnya Laporan kinerja telah menilai tentang perbaikan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan dan penilaian kinerja.
		- Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	Ya
d	Evaluasi Internal		
	Evaluasi internal terhadap kualitas dan pemanfaatan supaya :		
	.	Kualitas Evaluasi agar	
		- Evaluasi Program menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program;	Ya, benar dimana peran Biro Administrasi Pembangunan melakukan Radalok
		- Evaluasi Program yang disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tersebut untuk dilaksanakan ;	Ya, ditindak lanjuti oleh masing-masing Biro dilingkungan Pemprov.
		- Terdapat penilaian atas seluruh rencana aksi yang dilaksanakan dan ada alternatif perbaikan yang dilaksanakan;	Ya, cukup jelas dalam <i>cascading kinerja</i>
		- Hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi menunjukkan perbaikan setiap periodik.	Ya, Telah dievaluasi secara triwulan terhadap capaian kinerja dengan evaluasi program yang berdampak terhadap penilaian keberhasilan program melalui Radalop oleh Biro Pembangunan Daerah (Biro Admistrasi Pembangunan).
	.	Pemanfaatan Evaluasi agar	

	- Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang;	Ya
	- Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Ya, menindak lanjuti hasil evaluasi dengan rencana aksi
e	Evaluasi atas Pencapaian Kinerja	
	Dalam Pencapaian Kinerja yang dilaporkan (output) atau outcome capaian kinerja agar penetapan program sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta sumber data kinerja yang disajikan dalam LKJIP dapat ditelusuri.	Ya, Dalam Evaluasi dan analisis capaian kinerja telah disajikan dengan membandingkan data kinerja antara realisasi tahun ini dan sebelumnya dalam laporan kinerja .

3.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, yaitu sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	>100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70% - < 85%	Baik
4.	55% - <70%	Cukup
	<55 %	Kurang Baik

Adapun rincian pengukuran Indikator Kinerja Setda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	2 Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"	%	90	93	103,33
3	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	3 Jumlah Penegasan Titik Batas	PBU	5	-	-
4	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	4 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610	429	70,32
5	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparaturnya/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	5 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	95	65	68,42
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	6 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	90	100	111
7	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	7 Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi	Persentase	100	100	100
		8 Persentase target ketercapaian program/kegiatan bidang Perekonomian	Persentase	100	99,25	99,25
8	Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat	9 Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra	Persentase	85	85	100
		10 Persentase target ketercapaian Program/ Kegiatan bidang Kesra	Persentase	85	85	100
9	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	11 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90	90	100
10	Meningkatnya kerjasama antar daerah	12 Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)	MoU	50	38	76

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

11	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	13	Skor SKM rata-rata unit pelayanan	Skor	83	82,15	98,98
		14	Nilai Akuntabilitas Provinsi	-	78	77,50	99,36
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	15	Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor	90	87,5	97,22

3.3. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Insntasi Pemerintah

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

- I. Tujuan Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Tujuan 1	Sasaran
Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik	1 Tersusunnya LPPD
	2 Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional

1. **Sasaran Tersusunnya LPPD**

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Predikat LPPD	-	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
1	Predikat LPPD	-	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Sasaran Tersusunnya LPPD pada tahun 2017, tergolong Baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja, yang capaiannya tergolong Baik. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Indikator Predikat Kineja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan realisasi Tinggi dan sangat tinggi target capaian akhir RPJMD tahun 2018.

Indikator presentase meningkatnya kualitas LPPD dengan kegiatan menetapkan target kinerja sebesar 100%. Terkait penyusunan LPPD, ILPPD Tahun 2017 permasalahannya dalam hal penghimpunan data yaitu terlambatnya data yang diterima dari Kab/Kota dan Provinsi serta belum lengkapnya data pendukung yang disampaikan oleh SKPD. Dari hal tersebut tindak lanjut Tahun 2017 penghimpunan data ke Kabupaten/Kota dilaksanakan sebelum waktu penyampaian laporan yang ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Permasalahan :

1. Data yang dimaksud tersebut diatas harus disertai data pendukung yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan karena sangat penting untuk mengisi indikator kinerja kunci (IKK) yang terdiri dari 3 form isian
2. Aspek tingkat capaian kinerja untuk IKK Provinsi sangat penting karena memiliki bobot penilaian yang paling tinggi dan dukungan data SKPD dan Kabupaten/Kota harus benar.
3. Penilaian mandiri harus dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mengetahui indikator kinerja kunci (IKK) yang mengalami kenaikan dan penurunan.

Solusi :

1. Pembinaan dilakukan tingkat SKPD dengan memanggil Pejabat/staf yang menyusun data untuk LPPD Provinsi Kaltim.
2. Sosialisasi dan Bimtek dalam rangka optimalisasi penyusunan LPPD
3. Optimalisasi Penyusunan LPPD Tahun 2017 dilaksanakan dengan mengundang 10 kabupaten/kota se Kaltim.
4. Bimtek pengumpulan data pendukung LPPD Provinsi Kaltim Tahun 2016 dengan mengundang 10 kabupaten/kota dan 38 PD serta 9 Biro.
5. Penyampaian data PD harus disertai data pendukung yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
6. Penyampaian data kabupaten/kota harus disertai data pendukung yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

7. Pejabat/ staf yang ditunjuk oleh PD yang menangani data untuk bahan penyusunan LPPD Provinsi harus memiliki kompetensi dan juga mengetahui yang dimaksud data pendukung .
8. Meminta kepada PD yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan Program/Kegiatan agar segera menyelesaikan dan menyampaikannya, Pembinaan dilakukan tingkat kabupaten/kota dengan memanggil Pejabat/staf yang menyusun data untuk LPPD kabupaten/kota.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Tersusunnya LPPD adalah Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah.

2. Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
2	Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"	Persentase	90	85	93

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
2	Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"	Persentase	100	93	93

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 tergolong baik. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

1. Permasalahan akta karena masih banyak akta yang belum masuk dalam server SIAK
2. Masih banyak penduduk Wajib KTP belum melakukan perekaman, blanko KTP yang disediakan pusat terbatas dan untuk memenuhi kekurangannya harus diambil di pusat

Solusi :

1. Menerapkan pelayanan jemput bola dan pendataan akta secara manual melalui buku register
2. Keperluan blanko harus didata sesuai dengan kebutuhan
3. Anggaran tinta ribbon sesuai dengan kebutuhan

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional adalah :

1. Program Penataan dan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah
 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- II. Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

Tujuan 2	Sasaran
Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	3 Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM
	4 Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM

3. Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	610	917	429

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
3	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Dokumen	600	429	71,50

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya

Pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan 2017 secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Permasalahan :

1. Draft SK yang disampaikan oleh SKPD teliti terlebih dahulu
2. Proses Paraf Koordinasi dan Penandatanganan SK butuh waktu yang panjang.
3. Usulan draft SK terkadang minta segera diproses

Solusi :

1. Seluruh Kepala SKPD agar menyampaikan Prolegda setiap tahun terutama Perda kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim untuk dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur setiap tahun;
2. Dalam penyusunan draft Keputusan Gubernur terkait dengan substansi keputusan tersebut agar lebih teliti dan lebih ditingkatkan untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Kaltim;
3. Selalu melakukan komunikasi/koordinasi secara langsung dengan Pemerintah Pusat (Departemen terkait).
4. Selalu melakukan komunikasi/koordinasi secara langsung dengan DPRD Prov. Kaltim.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi
 2. Program Peningkatan Legislasi Daerah (PROLEGDA)
 3. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
4. Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
4	Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	95	94	65

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
4	Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	96	65	67,70

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

- Proses Perkara masih berlanjut di Pengadilan Tinggi (Banding) dan di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi).

Solusi :

1. Instansi / tergugat agar menyimpan / mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum / perkara, dan menyerahkannya ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim;
2. Seluruh Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur cq. Biro Hukum untuk diklarifikasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Peraturan

Daerah lainnya, dan tidak menghambat iklim investasi / biaya ekonomi tinggi;

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM adalah Program Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- III. Tujuan Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

Tujuan 3	Sasaran
Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama	5 Meningkatnya kerjasama antar daerah
	6 Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi

5. Meningkatnya kerjasama antar daerah

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
5	Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)	MoU	50	70	38

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
5	Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)	MoU	50	38	76

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatkan kerjasama antar daerah Sekretariat Daerah Provsinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang tidak melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

Saat ini PKS masih proses untuk disusun/dibuat oleh SKPD yang terkait

Solusi :

1. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim
2. Mengadakan rapat lanjutan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan seluruh SKPD di Lingkungan Pemprov

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Meningkatnya kerjasama antar daerah adalah Prog. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah.

6. Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
6	Jumlah Penegasan Titik Batas	PBU	5	5	-

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
6	Jumlah Penegasan Titik Batas	PBU	7	-	-

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, terhadap capaian Kinerja tidak terealisasi akibat :

1. Permendagri 76/2012 penegasan batas dapat ditentukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Permasalahan :

1. Kesepakatan batas tidak tercapai akibat perbedaan persepsi terhadap peta lampiran undang-undang pembentukan wilayah masing - masing.
2. Terdapat Sumber Daya Alam pada wilayah perbatasan yang disengketakan.
3. Perbesaran tarikan batas oleh kedua wilayah yang berbatasan.

Solusi :

1. Fasilitasi penegasan batas wilayah dengan menyamakan persepsi kedua wilayah yang berbatasan.
2. Menawarka pola kerjasama daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayah perbatasan.
3. Menawarkan tarikan batas yang win-win solution bagi kedua wilayah yang berbatasan.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi adalah Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

- IV. Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

Tujuan 4	Sasaran
Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel	7 Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap

7. Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
7	Prosentase program/kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	90	90	100

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
7	Prosentase program/kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase	100	100	100

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi Sekretariat Daerah Provsinsi Kalitmatim Timur pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui

target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

1. Adanya efisiensi anggaran
2. Belum meratanya pemahaman dan penguasaan Perundang-undangan serta peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, baik di tingkat kelompok kerja ataupun pejabat berwenang.

Solusi :

1. Mengoptimalkan perencanaan dengan pengendalian serta evaluasi yang baik
2. Memperbanyak pelatihan/bimtek/seminar mengenai perundang-undangan serta peraturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, baik ditingkat kelompok kerja ataupun pejabat berwenang.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap adalah Program pengendalian dan pelaporan pembangunan.

- V. Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 5	Sasaran
Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	8 Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian

8. Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
8	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi	Persentase	100	-	100
9	Persentase Target Ketercapaian Program/Kegiatan Bidang Perekonomian	Persentase	100	90,91	99,25

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
8	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi	Persentase	100	100	100
9	Target Ketercapaian Program/Kegiatan Bidang Perekonomian	Persentase	100	99,25	99,25

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Berdasarkan hasil

pengukuran yang dilakukan terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, sebagai berikut :

1. Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada Bidang Ekonomi.
2. Persentase Target Ketercapaian Program / Kegiatan Bidang Perekonomian Target 100 % terealisasi 99,37 %

Permasalahan :

Jumlah kelompok Komoditi yang dijaga kestabilan harganya untuk Provinsi Kaltim hanya 3 kelompok (Volatile Food, Administered Prices, Core Inflation).

Solusi :

Melakukan kordinasi dengan daerah pemasok Jawa Timur dan Sulawesi Selatan terutama Komoditi pangan melalui distributor.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian Tahun 2017 adalah Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

- VI. Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

Tujuan 6	Sasaran
Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	9 Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

9. Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
10	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra	Persentase	85	80	85
11	Persentase target ketercapaian Program/ Kegiatan bidang Kesra	Persentase	85	80	85

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
10	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra	Persentase	85	85	100
11	Persentase target ketercapaian Program/ Kegiatan bidang Kesra	Persentase	85	85	100

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

1. Belum efektifnya Pengendalian dan koordinasi pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di SKPD dan Kabupaten/Kota.
2. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya pada Bidang Kesra.

Solusi :

1. Sinergi antar bagian, SKPD dan Kabupaten/Kota pada pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan data dan informasi yang akurat, informatif dan komunikatif serta menguatkan eksistensi Biro di eksternal organisasi Bidang Kesra.
2. Mengefektifkan sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya pada Bidang Kesra.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada program/kegiatan bidang Kesra

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya Kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat adalah :

1. Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat
2. Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- VII. Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut. :

Tujuan 7	Sasaran
Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim	10 Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas

10. Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
12	Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90	67,75	90

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
12	Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase	90	90	100

Hasil Pengukuran dapat disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran, Terhadap capaian Kinerja yang melampaui target Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun selanjutnya.

Permasalahan :

- Masih adanya pemberitaan/publikasi pers dan media massa yang bersifat negatif.

Solusi :

- Terlaksananya komunikasi antara pemerintah, media massa dan masyarakat

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas adalah Pelayanan komunikasi kehumasan.

- VIII. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (satu) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 8	Sasaran
Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik	11 Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel

11. Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
13	Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	83 Sangat Baik	75	82,15
14	Nilai Akuntabilitas Provinsi	Kategori/ Nilai	78	77,37	77,50

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2017	Tingkat Pencapaian
13	Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	85	82,15	96,65
14	Nilai Akuntabilitas Provinsi	-	80	77,50 (BB)	96,88

Berdasarkan Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018, pada tahun 2017 telah ditetapkan target yang ingin dicapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sebesar rata-rata 82,15 yang merupakan angka akumulasi dari beberapa SKPD yang melakukan riset tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, Biro Organisasi telah melakukan :

1. Mensosialisasikan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Adanya memberikan motivasi dengan pemberian penghargaan dari Ombudsman RI tentang kepatuhan menjalankan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Adapun Indikator penilaian IKM terdiri dari

1. Prosedur Pelayanan,
2. Persyaratan Pelayanan,
3. Kejelasan petugas pelayanan,
4. Kedisiplinan petugas pelayanan,
5. Tanggung jawab petugas pelayanan,
6. Kemampuan petugas pelayanan,
7. Kecepatan pelayanan,
8. Keadilan mendapatkan pelayanan,
9. Kesopanan dan keramahan petugas,
10. Kewajaran biaya pelayanan,
11. Kesesuaian biaya pelayanan,
12. Kepastian jadwal pelayanan,
13. Kenyamanan lingkungan,
14. Keamanan pelayanan.

Pada tahun 2017 merupakan evaluasi tahun keempat RPJMD 2013-2018 Provinsi Kalimantan Timur, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Biro Organisasi sebagai lembaga yang diberikan

amanah untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)** untuk mengetahui sejauhmana sudah dilakukan oleh lembaga yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebesar 82 target ini ditentukan dari rata-rata dari perangkat daerah yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan terdapat nilai rata-rata sebesar 82,15 berarti SKM yang diperoleh menunjukkan nilai yang cukup besar yaitu nilai rata-rata (81,72 -100) dengan kategori Sangat Baik (A).

Adapun nilai persepsi Interval SKM Nilai Persepsi, Interval SKM, Mutu Pelayanan sebagai mana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Acuan Nilai Persepsi Interval SKM dan Nilai Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PESEPSI	NILAI INTERVAL IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	A	Sangat baik

Sumber Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim

Pada Tahun 2017 sampai dengan 30 Nopember 2017 hanya 5 perangkat daerah yang telah menyampaikan laporan hasil pengukuran SKM, yaitu : 1).RSUD AWS, 2).RSJD AHM, 3).Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 4).Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 5).UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I dan II Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilaisementara rata-rata SKM Provinsi Kaltim tahun 2017 adalah sebesar 82,15. Berikut OPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.3

**Instansi /Lembaga Yang Melaksanakan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

No	INSTANSI/LEMBAGA	NILAI
1.	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	-
2.	RSUD A. Wahab Sjahanie	93,25
3.	RSJD Atma Husada Mahakam	87,57
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-
5.	Kepala Dinas Kesehatan	-
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
7.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	66,50
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	-
9.	Kepala Dinas Sosial	-
10.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	83,04
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80,42
13.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	-
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	-
15.	Kepala Dinas Perkebunan	-
16.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	-
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Provinsi Kaltim	82,15

Sumber Biro Organisasi Setda Prov.Kaltim

Analisis hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disajikan dalam laporan ini diharapkan merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD/Unit Pelayanan Publik terkait, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik. Dari uraian dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan IKM Tahun 2017 dilaksanakan pada 17 (tujuhbelas) unit pelayanan atau PD yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) rumpun SKPD yaitu :
 - a. Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

- b. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
2. Dari hasil pelaksanaan survei IKM yang dilaksanakan pada 17 (tujuhbelas) PD dimaksud, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, hampir keseluruhan unit pelayanan masuk dalam kategori "BAIK" dan Peningkatan Mutu Pelayanan menjadi sangat baik. Namun masih ada beberapa prioritas untuk dilakukan pembinaan terhadap peningkatan mutu pelayanan yang masih kurang.
 3. Hasil pengukuran dari seluruh unit pelayanan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan jenis layanan yang diberikan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai IKM sebesar 82,15 maka pelayanan publik dikategorikan BAIK dan MEMUASKAN bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.

Permasalahan :

1. Masih ada sebagian perangkat daerah yang belum/tidak mengalokasikan biaya untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat/IKM.
2. Masih ada sebagian perangkat daerah yang belum melaporkan secara tertib/berkala hasil survey Kepuasan Masyarakat/IKM kepada Gubernur Kalimantan Timur

Solusi :

1. Peningkatan atas pelayanan publik terus didorong oleh pemerintah Indonesia untuk membangun kepercayaan masyarakat
2. Wilayah birokrasi juga menjadi problematika dimana pelayanan publik harus melakukan interaksi yang baik antara pemberi layanan dengan penerima layanan.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 untuk tahun pertama 2014 melalui Biro Organisasi ditetapkan 72 (B+) ~~sedangkan capaiannya masih tetap sama (70,97(B+)), ini artinya bahwa~~

kinerja akuntabilitas sudah memenuhi keinginan dari misi dari RPJMD gubernur, namun predikat tersebut hendaknya dapat lebih ditingkatkan kepada yang lebih tinggi lagi. Pada tahun 2015 hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN dan RB nilai akuntabilitas kinerja 75,14, dan Pada tahun 2016 yang merupakan evaluasi capaian kinerja RPJMD 2013-2018 dengan nilai akuntabilitas kinerja 77,36 dengan sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan indikator Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja serta indikator *outcome* Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi yang ada peningkatan tahun 2017 dengan nilai akuntabilitas kinerja 77,50 dengan target 78 (BB).

Secara keseluruhan Target dan Realisasi Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam RPJMD telah ditetapkan : Tahun Tahun 2015 dengan target B+ (74,00) dengan Realisasi BB (75,14) Tahun 2016 dengan target BB (76,00) dengan realisasi BB (77,36) Tahun 2017 dengan target BB (78,00) dengan realisasi BB (77,50). Dengan adanya perubahan regulasi dalam memberikan penilaian berdasarkan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP telah dilakukan beberapa perubahan antara lain :

Perubahan Bobot Penilaian :

ASPEK	SEMULA	MENJADI	PERUBAHAN
1. Perencanaan Kinerja	35 %	30 %	Turun 5 %
2. Pengukuran Kinerja	20%	25%	Naik 5%
3. Pelaporan Kinerja	15%	15%	Tetap
4. Evaluasi Kinerja	10%	10%	Tetap
5. Capaian Kinerja	20%	20%	Tetap
Total	100%	100%	

Perubahan Pengkategorian Nilai :

NO.	KATEGORI	SEMULA	MENJADI	INTERPRETASI
1	AA	85 - 100	90 – 100	Sangat
2	A	75 – 85	80 – 90	Memuaskan
3	BB	65 – 75	70 – 80	Sangat baik
4	B	60 - 65	60 - 70	Baik

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017, pada Program Peningkatan kualitas manajemen berbasis Kinerja dengan indikator predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi menunjukkan adanya peningkatan dari target yang ditetapkan 78 menjadi 77,50 dengan predikat BB dengan dasar penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013 - 2017

Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai		Bobot	Nilai			Ket
		2013	2014		2015	2016	2017	
a. Perencanaan Kinerja	35	25,04	25,25	30	24,86	25,33	25,35	
b. Pengukuran Kinerja	20	13,41	14,01	25	18,40	18,84	18,90	
c. Pelaporan Kinerja	15	12,10	11,70	15	12,16	12,46	12,47	
d. Evaluasi Kinerja	10	7,31	7,31	10	6,26	7,27	7,31	
e. Capaian Kinerja	20	12,89	12,70	20	13,46	13,46	13,47	
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,75	70,97	100	75,14	77,36	77,50	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B		BB	BB	BB	

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim 2017

Nilai tertinggi Evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah AA (Sangat Memuaskan), dengan skor 90 - 100, sedangkan A (Memuaskan) skornya 80 – 90, BB (Sangat Baik) dengan skor 70 – 80, B (baik) skor 60 – 70, CC (Cukup) skor 50 – 60, C (Kurang) skor 30 – 50, dengan nilai D (Sangat Kurang) dengan skor 0 – 30.

Permasalahan :

Penerapan manajemen kinerja: (Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat)

1. Perencanaan kinerja
 - a. Perlu penyempurnaan pada orientasi hasil dan *cascade* IKU
 - b. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terkait dengan Sasaran Strategis
2. *Performance based organization* (Organisasi Berbasis Kinerja)

- a. Kualitas evaluasi program fokus pada output dan penyerapan anggaran
 - b. E-performance belum dimanfaatkan dengan optimal
3. Evaluasi kinerja berkelanjutan
Tindak lanjut atas rekomendasi tahun lalu dan penyempurnaan yang dilakukan belum cukup mempunyai daya ungkit mewujudkan budaya kinerja

Solusi:

1. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
2. Pembangunan Aplikasi SiAKIP.
3. Asistensi Keselarasan / Kesesuaian Indikator Kinerja RPJMD dengan Renstra SKPD.
4. Asistensi Indikator Kinerja Utama
5. Penyusunan Indikator Kinerja Individu sampai tingkat eselon IV
6. Penyusunan Rencana Aksi atas Kinerja (sesuai dengan PK)
7. Melakukan Coaching Clinic SAKIP pada Pemerintah Kabupaten dan Kota
8. Melakukan Penyusunan Cascading Kinerja sampai ke tingkat Eselon IV
9. Penyusunan PK sampai dengan Es IV.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja secara berkala
11. Peningkatan upaya fasilitasi/pendampingan penerapan Sistem AKIP di Pemprov. Kaltim bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel adalah :

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program Penataan Organisasi

Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi

Fasilitasi Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota

Program Penataan Pendayagunaan Aparatur

Penataan dan Pendayagunaan Aparatur

Penataan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kaltim

Pengembangan Budaya Kerja aparatur

Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja

Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP

- IX. Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum dan Ketatausahaan Biro, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pelayanan Kerumahtanggaan, Sandi dan Telekomunikasi dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.

Capaian Sasaran Strategis dan Indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan 11	Sasaran
Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum dan Ketatausahaan Biro, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pelayanan Kerumahtanggaan, Sandi dan Telekomunikasi Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	12 Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi Umum

12. Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi Umum

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Realisasi 2017
15	Skor SKM	Skor	90	85	87,5

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir	Realisasi	Tingkat
-----	-----------	--------	--------------	-----------	---------

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017

	Kinerja		RENSTRA	2017	Pencapaian
15	Skor SKM	Skor	95	87,5	92,10

Permasalahan :

Kurangnya kualitas SDM, Keluhan tentang keamanan lingkungan kantor, banyaknya keluhan terhadap fasilitas layanan di Biro Umum.

Solusi :

Peningkatan SDM, Penambahan Anggaran untuk Peningkatan Fasilitas keamanan dan Fasilitas Layanan lainnya.

Program/kegiatan unggulan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Sasaran Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi Umum adalah :

Analisa Efisiensi.

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 4 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional dengan capaian kinerja 103,33%, Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana dengan capaian kinerja 111%, Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan capaian kinerja 100% dan Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas dengan capaian kinerja 100%, namun dengan realisasi anggaran rata-rata hanya mencapai 94,58% dari total anggaran yang dialokasikan untuk 4 Sasaran tersebut. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian, dengan pencapaian kinerja sebanyak 99,62%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 93,26%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun

sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip efektif dan efisiensi sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian indikator sasaran dan efisiensi penyerapan anggaran, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.5

Capaian Sasaran dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas LPPD	100	90,78	9,22
2	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	103,33	99,10	4,23
3	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	-	99,61	-
4	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	70,32	97.67	(27,35)
5	Terwujudnya bantuan hukun dan aparatur/masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	68,42	99,62	(31,20)
6	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	111	92,57	18,43
7	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	99,63	93,36	6,27
8	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100	91,23	8,77
9	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	100	101,57	(1,57)
10	Meningkatnya kerjasama antar daerah	76	99,47	(23,47)

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Alokasi Anggaran Sasaran dan program Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	% Capaian	Penanggung Jawab
1.	Tersusunnya LPPD	381.821.530,-	420.600.000,-	90,78	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah
2.	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	412.274.850,-	416.000.000,-	99,10	
3.	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	1.336.589.482,-	1.341.850.000,-	99,61	
4.	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	173.365.820,-	177.500.000	97,67	Biro Hukum
5.	Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	796.964.467,-	800.000.000,-	99,62	
6.	Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap	4.285.896.837,-	4.630.000.000,-	92,57	Biro Administrasi Pembangunan
7.	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	2.987.404.350,-	3.200.000.000,-	93,36	Biro Perekonomian
8.	Terwujudnya kualitas koodinasi bidang kesejahteraan rakyat	2.246.017.222,-	2.462.000.000,-	91,23	Biro Sosial
9.	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	1.212.066.191,-	1.231.138.048,-	101,57	Biro Hubungan Masyarakat
10.	Meningkatnya kerjasama antar daerah	557.436.671,-	560.430.976,-	99,47	
11.	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	1.584.465.610,-	1.700.000.000,-	93,2	Biro Organisasi
12.	Terwujudnya pelayanan pengelolaan admnistrasi umum	51.081.943.837,-	59.966.971.275,-	85,18	Biro Umum

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Setda Prov. Kaltim ini disusun mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2017 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut :

1. Beberapa indikator baik input, proses, output, outcome maupun benefit masih belum mempunyai standar baku. Untuk selanjutnya standar ini akan disempurnakan untuk setiap tahunnya.
2. Belum semua kegiatan teridentifikasi anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan sulitnya memisahkan biaya satu kegiatan dengan yang lain, sehingga banyak kegiatan yang tidak ada terukur anggarannya dalam indikator input. Untuk masa yang akan datang hal ini akan menjadi perhatian.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *clean government* dalam rangka mewujudkan *good governance*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel serta dapat menjadi umpan balik bagi *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian

merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2017 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.